



**BUKU I (RINGKASAN EKSEKUTIF)
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2026**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DKI JAKARTA**

STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)
PROVINSI DKI JAKARTA
Ringkasan Eksekutif
(Executive Summary)

Nomenklatur Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) diubah menjadi laporan **Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)**. SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 disusun oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2026 tentang Tim Penyusun Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah, dengan melibatkan unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perguruan tinggi, serta lembaga swadaya masyarakat.

SLHD merupakan instrumen yang menyajikan data dan informasi terkini mengenai kondisi lingkungan hidup daerah, sekaligus menggambarkan strategi dan upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dokumen ini juga berfungsi sebagai bahan referensi bagi para pemangku kepentingan dalam melakukan evaluasi, merumuskan kebijakan, menyusun rencana pembangunan berkelanjutan, serta menetapkan prioritas pembangunan yang selaras dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, dokumen SLHD dipublikasikan melalui situs resmi pemerintah daerah agar dapat diakses oleh masyarakat luas. Ketersediaan data dan informasi lingkungan yang komprehensif menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan hak dan kewajiban seluruh pihak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1. ANALISIS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA

Analisis lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta dilakukan menggunakan pendekatan DPSIR (*Driving Force–Pressure–State–Impact–Response*) untuk mengidentifikasi keterkaitan antara faktor pendorong, tekanan, kondisi lingkungan, dampak yang ditimbulkan, serta upaya respons yang diperlukan. Melalui pendekatan ini, permasalahan lingkungan dapat dianalisis secara komprehensif sehingga langkah-langkah pengelolaan yang tepat dapat dirumuskan guna meminimalkan dampak yang terjadi.

Laporan SLHD Tahun 2026 (status lingkungan hidup Tahun 2025) mencakup 8 (delapan) matra, meningkat dari sebelumnya 6 (enam) matra pada dokumen DIKPLHD. Penambahan dan penyesuaian matra ini dilakukan untuk memperkuat cakupan analisis terhadap isu-isu lingkungan strategis di Provinsi DKI Jakarta. Berikut perbandingan matra antara DIKPLHD dan SLHD.

Tabel 1 Perbandingan Matra DIKPLHD dan SLHD

No	Matra DIKPLHD (Versi 2025)	Matra SLHD (Versi Baru 2026)	Notes
1	Tata Guna Lahan	Lahan dan Hutan	Fokus pada ruang terbuka hijau (RTH) dan alih fungsi lahan.
2	Kualitas Air	Kualitas Air	Tetap (meliputi air permukaan dan air tanah).
3	Kualitas Udara	Kualitas Udara	Tetap (ISPU dan Emisi Kendaraan).
4	Risiko Bencana	Risiko Bencana	Fokus pada banjir dan rob (<i>Sea Level Rise</i>).
5	Perkotaan/Persampahan	Pengelolaan Sampah dan Limbah	Memasukkan limbah B3 secara lebih eksplisit.
6	Tata Kelola	Keanekaragaman Hayati	BARU: Fokus pada ekosistem perkotaan dan spesies lokal.
7	-	Laut, Pesisir, dan Pantai	BARU: Penting untuk Jakarta Utara/Kep. Seribu.
8	-	Perubahan Iklim	BARU: Integrasi dengan target <i>Net Zero Emission</i> daerah.

Dalam ringkasan eksekutif ini, hasil analisis untuk masing-masing matra disajikan secara ringkas dalam bentuk tabel untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi, permasalahan, serta respons pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta.

Tabel *DPSIR* Matra 1. Keanekaragaman Hayati

<i>Driving Force</i>	<i>Pressure</i>	<i>State</i>	<i>Impact</i>
• Pertumbuhan penduduk dan tingkat urbanisasi Kepadatan penduduk DKI Jakarta meningkat dari 15.979 jiwa/km² pada tahun 2020 menjadi 16.164 jiwa/km² pada tahun 2024, dengan total jumlah penduduk mencapai 10,677 juta jiwa. (BPS-Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2026). Jumlah ini berpotensi meningkatkan kebutuhan lahan dan sumber daya, sehingga mendorong konversi habitat alami dan menekan keberadaan keanekaragaman hayati di wilayah perkotaan <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.1.1</i> • Pertumbuhan Ekonomi	• Alih fungsi lahan dan fragmentasi habitat Keterbatasan RTH yang hanya mencapai sekitar 9–10% dari target 30% telah menyebabkan fragmentasi habitat yang signifikan serta menurunkan daya dukung lingkungan bagi keberlangsungan spesies. Berdasarkan data RTH publik yang tercantum pada laman Jakarta Satu, proporsi RTH publik tercatat hanya sekitar 5%, yang menunjukkan masih terbatasnya ketersediaan ruang hijau yang dapat diakses dan berfungsi optimal sebagai habitat alami di wilayah perkotaan. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.1.2 hal 34-35</i>	• Ketersediaan RTH Ketersediaan ruang terbuka hijau yang hanya 9-10%, menunjukkan ketersediaan habitat alami yang terbatas serta kondisi ekosistem yang tidak optimal bagi keberlangsungan biodiversitas. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.1.3 hal 40</i> • Status Populasi Spesies Biodiversitas masih ditemukan di Jakarta, namun dalam kondisi terfragmentasi dan tertekan oleh aktivitas perkotaan. Menurut data BKSDA, saat ini ada ±290 spesies flora-fauna, yang menunjukkan masih adanya potensi biodiversitas, namun	• Penurunan kualitas ekosistem Dengan adanya ±100unit penangkaran (ex-situ), terlihat bahwa habitat alami tidak lagi mampu menopang kehidupan spesies secara optimal. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.1.4 hal 43</i> • Dampak kesehatan (DBD, ISPA) Peningkatan kasus DBD Jakarta yang mencapai 10.075 kasus tahun 2025, mencerminkan dampak degradasi lingkungan yang menciptakan kondisi ideal bagi vektor penyakit. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.1.4 hal 44</i>

PDRB DKI Jakarta pada tahun 2024 mencapai Rp3.679,36 triliun dengan pertumbuhan sebesar 4,90%, menjadikan Jakarta sebagai magnet lapangan kerja yang sulit tertandingi kota lain di Indonesia, yang memicu pertumbuhan penduduk melalui urbanisasi. Lokus di Buku 2: Sub-bab II.1.1 hal 29 Perubahan iklim Perubahan iklim meningkatkan frekuensi kejadian cuaca ekstrem (hujan ekstrem >400 mm/hari) yang mengganggu stabilitas ekosistem urban serta mempercepat degradasi habitat alami Lokus di Buku 2: Sub-bab II.1.1 hal 29 - 33 Permintaan Komoditas Biota Liar	Timbulan Sampah Total timbulan sampah yang dihasilkan oleh DKI Jakarta tahun 2025 per hari mencapai 9.187,24 ton (3.353.342,62 ton/tahun) berdasarkan SIPSN. Tingginya timbulan sampah menjadi tekanan terhadap lingkungan karena memicu pencemaran yang menurunkan kualitas habitat biodiversitas. Lokus di Buku 2: Sub-bab II.1.2,hal. 36 - 37 Perdagangan satwa liar Aktivitas perdagangan satwa liar, menurut BKSDA terdapat ±250 data perdagangan satwa. Hal ini meningkatkan tekanan terhadap populasi spesies, terutama karena Jakarta menjadi pusat distribusi. Lokus di Buku 2: Sub-bab II.1.2,hal. 37 - 38	dengan tingkat kerentanan yang cukup tinggi. Lokus di Buku 2: Sub-bab II.1.3 hal 41	Penurunan keanekaragaman hayati Tekanan urbanisasi menyebabkan penurunan biodiversitas yang berdampak pada hilangnya fungsi ekologis. Lokus di Buku 2: Sub-bab II.1.4 hal 45
--	---	---	---

Permintaan biota liar di wilayah urban (± 250 entri perdagangan) mendorong eksploitasi spesies melalui rantai perdagangan, menjadi akar tekanan terhadap biodiversitas. <u>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.1.1, hal. 37 - 38</u>	• Pencemaran lingkungan Pencemaran air dan udara menurunkan kualitas habitat dan mengganggu keseimbangan ekosistem. <u>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.1.2, hal. 39 - 40</u>		
<i>Response to Driving Force</i>	<i>Response to Pressure</i>	<i>Response to State</i>	<i>Response to Impact</i>
• Edukasi konsumsi ramah lingkungan. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurangi konsumsi yang berdampak negatif terhadap lingkungan, termasuk terhadap pemanfaatan biota liar. • Penerapan Ecolabel mendorong penggunaan produk berlabel ramah lingkungan sebagai upaya mengarahkan pola konsumsi yang lebih	• Pengetatan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) serta pengembangan koridor ekologis. Penguatan pengawasan lalu lintas TSL dilakukan untuk menekan perdagangan ilegal, disertai pengembangan koridor ekologis guna menghubungkan habitat yang terfragmentasi. • Optimalisasi pengelolaan sampah dengan peningkatan kinerja	• Perlindungan dan penambahan RTH. Upaya dilakukan melalui perlindungan kawasan RTH eksisting serta penambahan luas RTH untuk meningkatkan ketersediaan habitat alami dan memperbaiki kualitas ekosistem perkotaan. • Optimalisasi unit Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar (Ex-situ). Penguatan fungsi unit penangkaran satwa dan	• Adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem • Pengembangan ekowisata • Implementasi Nature-based Solutions (NbS) dan restorasi ekosistem urban <u>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.1.5 hal 50-52</u>

berkelanjutan serta mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam. <u>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.1.1 hal 46</u>	dilakukan untuk mendukung pencapaian target Jakstrada, sekaligus mengurangi tekanan pencemaran terhadap lingkungan dan habitat biodiversitas. <u>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.1.5 hal 47- 48</u>	tumbuhan liar (ex-situ) sebagai upaya konservasi untuk menjaga keberlangsungan spesies, khususnya yang terancam atau mengalami tekanan di habitat alaminya. <u>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.1.5 hal 49-50</u>	
---	---	--	--

Tabel *DPSIR* Matra 2. Kualitas Air

<i>Driving Force</i>	<i>Pressure</i>	<i>State</i>	<i>Impact</i>
• Pertumbuhan penduduk Jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai 10.881.514 jiwa, serta kepadatan rata-rata mencapai 14.973 jiwa/km², yang meningkatkan kebutuhan lahan untuk permukiman dan aktivitas ekonomi secara signifikan. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.2.1 hal 55</i> • Peningkatan aktivitas ekonomi dan pengembangan industri Terdapat 1.600 perusahaan besar dan sedang di wilayah DKI Jakarta. Sementara itu, data dari Dinas PPKUKM menunjukkan di tahun 2025 terdapat lebih dari 300.000 UMKM, dimana lebih dari 70% merupakan usaha kuliner	• Pencemaran dari limbah industri dan Rumah Tangga. Hasil penelitian Lemtek UI 2025 menunjukkan adanya 11499 sumber pencemar titik yang berasal dari aktivitas ekonomi, dan 7196 pencemar non titik yang berasal dari rumah tangga dan perkantoran. Keterbatasan jumlah industri yang memiliki IPAL terutama dari industri UMKM. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.2.2 hal 57</i> • Tingginya kebutuhan air minum dan air bersih seiring dengan bertambahnya penduduk dan aktivitas ekonomi.	• Penurunan nilai IKA di tahun 2025 (tidak mencapai target) Indeks Kualitas Air (IKA) Jakarta 2025 turun tipis menjadi 40,82 (dari 41,22 pada 2024). Penurunan ini menunjukkan kualitas air yang terus terdegradasi, terutama akibat parameter organik, nutrien, dan mikrobiologi yang konsisten melampaui ambang batas di mayoritas titik pemantauan. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.2.3 hal 64</i> • Kondisi Air Sungai Sebagian besar sungai di DKI Jakarta (kurang lebih 99,24%) berada dalam kondisi tercemar, yang ditunjukkan oleh tingginya parameter pencemar	• Dampak terhadap kesehatan masyarakat Kualitas air yang buruk meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan DBD akibat paparan bakteri patogen dan sanitasi yang tidak memadai. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.2.4 hal 75</i> • Dampak sosial dan ketimpangan Keterbatasan akses terhadap air bersih meningkatkan ketimpangan sosial, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada air tanah yang telah tercemar. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.2.4 hal 76</i>

yang pada umumnya tidak diwajibkan melakukan pengelolaan air limbah. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.2.1 hal 55</i> • Posisi geografis DKI Jakarta Secara geografis, posisi Jakarta di dataran rendah dengan elevasi rata-rata 7 meter di atas permukaan laut menjadikannya muara bagi 13 daerah aliran sungai (DAS) utama. Lokasi geografis Jakarta yang berada di wilayah hilir juga menjadikannya rentan terhadap akumulasi pencemaran dari daerah hulu. Kondisi ini diperumit dengan interaksi langsung wilayah pesisir utara Jakarta terhadap dinamika laut. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.2.1 hal 56</i>	Sebanyak 42,6% rumah tangga telah menggunakan jasa PDAM sebagai sumber air bersihnya <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.2.2 hal 58</i>	seperti BOD, COD, dan coliform akibat dominasi limbah domestik dan perkotaan. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.2.3 hal 66</i> • Kondisi Air Waduk/Danau Berdasarkan data DLH DKI 2023-2024, kualitas air waduk dan danau di Jakarta cenderung menurun akibat eutrofikasi yang memicu pertumbuhan alga berlebih dan menurunkan kualitas perairan. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.2.3 hal 68</i> • Kondisi Air Tanah Data DLH DKI tahun 2024-2025 menunjukkan 30% air tanah DKI Jakarta tercemar berat (coliform), sehingga menunjukkan adanya infiltrasi limbah domestik ke dalam	• Dampak lingkungan (degradasi ekosistem sungai, waduk, dan perairan pesisir) Pencemaran air menyebabkan degradasi ekosistem perairan, termasuk penurunan keanekaragaman hayati dan hilangnya fungsi alami sungai dan waduk. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.2.4 hal 77</i> • Dampak ekonomi dan produktivas Penurunan kualitas air meningkatkan biaya pengolahan air bersih serta menurunkan produktivitas sektor yang bergantung pada sumber daya air (perkiraan kebutuhan >1.000 juta m³/tahun) <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.2.4 hal 77</i>
---	--	---	---

		akuifer, yang menandakan buruknya sistem sanitasi perkotaan. <u>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.2.3 hal 72</u>	• Kerentanan terhadap bencana Kondisi sungai yang tercemar dan mengalami sedimentasi meningkatkan risiko banjir di wilayah perkotaan, terutama saat curah hujan tinggi. <u>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.2.4 hal 77-78</u>
<i>Response to Driving Force</i>	<i>Response to Pressure</i>	<i>Response to State</i>	<i>Response to Impact</i>
• Program Nasional Keluarga Berencana (KB) • Pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta penegakkan hukum kegiatan usaha <u>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.2.5 hal 78</u>	• Program/Upaya pengelolaan beban pencemaran domestik: • Pembangunan Jakarta Sewerage System (JSS) • Pembangunan SPALD • Pembangunan Tangki Septik Komunal <u>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.2.5 hal 79</u> • Penanganan sampah badan air ciliwung <u>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.2.5 hal 79-80</u>	• Pemantauan Kualitas Air Permukaan (Sungai dan Waduk). Lokasi Prioritas: Sungai Ciliwung (CLW 2-4), Jembatan PIK, Jakarta Utara <u>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.2.5 hal 80</u>	• Deklarasi penerapan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) • Deklarasi Stop BABS dengan STBM lainnya telah dilakukan di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Sunter Jaya, Sunter Agung dan Ancol <u>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.2.5 hal 80-81</u>

--	--	--	--

Tabel *DPSIR* Matra 3. Laut, Pesisir, dan Pantai

<i>Driving Force</i>	<i>Pressure</i>	<i>State</i>	<i>Impact</i>
• Urbanisasi dan aktivitas ekonomi pesisir Aktivitas ekonomi di pesisir Jakarta Utara mendorong urbanisasi. Adanya penambahan penduduk memicu kebutuhan lahan pemukiman, infrastruktur, dan sumber daya. Kawasan pesisir menjadi pusat kegiatan pelabuhan, industri, dan permukiman padat yang terus berkembang. Data menunjukkan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi pesisir yang tinggi, yang berkontribusi terhadap peningkatan beban pencemaran dan tekanan ekosistem. Lokus di Buku 2: Sub-bab II.3.1 hal	• Beban pencemaran dari aliran sungai Beban pencemaran di perairan pesisir Jakarta didominasi oleh limpasan dari 17 sungai yang membawa limbah domestik dan aktivitas perkotaan ke Teluk Jakarta. Data kualitas air laut menunjukkan kondisi di muara cenderung lebih rendah dibanding laut lepas, mencerminkan tingginya tekanan pencemaran dari darat. Lokus di Buku 2: Sub-bab II.3.2 hal. 84 • Penurunan muka tanah pesisir Penurunan muka tanah di pesisir Jakarta menjadi tekanan signifikan yang memperburuk kondisi	• Kualitas air laut (IKAL belum optimal di muara) Kualitas air laut di DKI Jakarta menunjukkan kondisi yang belum merata, dengan nilai IKAL berada pada kategori sedang secara umum (78,92). Namun, wilayah muara sungai memiliki kualitas lebih rendah akibat akumulasi beban pencemar dari darat. Kondisi ini menunjukkan adanya gradien kualitas air dari muara ke laut lepas yang mencerminkan tekanan lingkungan pesisir. Lokus di Buku 2: Sub-bab II.3.3 hal. 86; Buku 3: Tabel 26 • Luas mangrove terbatas dan terfragmentasi	• Banjir rob dan abrasi meningkat Banjir rob dan abrasi di pesisir Jakarta menunjukkan tren peningkatan akibat kombinasi penurunan muka tanah dan kenaikan muka laut. Laju penurunan tanah memperbesar luas genangan di wilayah pesisir utara. Data kejadian rob di beberapa wilayah seperti Muara Angke dan Marunda menunjukkan frekuensi dan luas genangan yang semakin meningkat. Lokus di Buku 2: Sub-bab II.3.3 hal. 90 • Kerusakan ekosistem pesisir Kerusakan ekosistem pesisir terjadi akibat tekanan pencemaran dan perubahan

Driving Force	Pressure	State	Impact
Posisi Jakarta sebagai wilayah hilir Sebagai wilayah hilir, Jakarta menerima akumulasi limpasan dari daerah hulu Jabodetabek yang bermuara ke Teluk Jakarta. Terdapat sekitar 17 sungai yang membawa limbah domestik dan perkotaan ke wilayah pesisir. Kondisi ini menyebabkan tekanan pencemaran yang tidak hanya berasal dari dalam wilayah, tetapi juga dari luar Jakarta. Lokus di Buku 2: Sub-bab II.3.1 hal 83 Perubahan iklim (kenaikan muka laut) Perubahan iklim mendorong kenaikan muka laut yang meningkatkan kerentanan wilayah pesisir Jakarta terhadap genangan dan	lingkungan pesisir. Laju penurunan tanah mencapai 5-10 cm per tahun akibat eksploitasi air tanah dan beban bangunan. Kondisi ini meningkatkan kerentanan terhadap genangan dan memperparah dampak kenaikan muka laut. Lokus di Buku 2: Sub-bab II.3.2 hal 85 Degradasi mangrove, lamun dan terumbu karang Ekosistem pesisir mengalami degradasi akibat tekanan pencemaran, alih fungsi lahan, dan aktivitas manusia. Luas mangrove di DKI Jakarta tercatat sekitar ±298,04 ha menunjukkan keterbatasan ekosistem pelindung alami pesisir. Sementara itu, kondisi terumbu karang di Kepulauan	Ekosistem mangrove di DKI Jakarta masih terbatas dan tersebar tidak merata, sehingga belum optimal dalam menjalankan fungsi ekologisnya. Luas mangrove tercatat sekitar ±298,04 ha, yang relatif kecil dibanding kebutuhan perlindungan pesisir. Fragmentasi kawasan juga mengurangi efektivitas mangrove sebagai pelindung alami terhadap abrasi dan gelombang. Lokus di Buku 2: Sub-bab II.3.3 hal 88; Buku 3 Tabel 24. Terumbu karang didominasi kondisi sedang Kondisi terumbu karang di Kepulauan Seribu didominasi kategori sedang-rusak, yang menunjukkan adanya tekanan lingkungan namun belum	pemanfaatan ruang yang terus berlangsung. Luas mangrove yang terbatas ±298,04 ha, kondisi terumbu karang yang didominasi kategori sedang, dan kondisi lamun yang rusak menunjukkan adanya degradasi ekosistem. Kondisi ini menyebabkan menurunnya fungsi ekologis pesisir sebagai pelindung alami dan habitat biota. Lokus di Buku 2: Sub-bab II.3.4 hal 90; Buku 3 Tabel 23 Kerugian ekonomi dan kerentanan masyarakat Dampak lingkungan pesisir berkontribusi pada kerugian ekonomi dan meningkatnya kerentanan masyarakat pesisir. Banjir rob menyebabkan gangguan aktivitas ekonomi, kerusakan infrastruktur, serta penurunan produktivitas

<i>Driving Force</i>	<i>Pressure</i>	<i>State</i>	<i>Impact</i>
abrasi. Fenomena ini diperparah oleh kondisi topografi rendah dan dinamika pesisir yang rentan. Data menunjukkan tren kenaikan muka laut dan peningkatan kejadian rob di pesisir Jakarta. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.3.1 hal. 84</i> • Pemanfaatan ruang pesisir Pemanfaatan ruang pesisir yang intensif untuk permukiman, industri, dan infrastruktur menyebabkan perubahan tutupan lahan dan berkurangnya fungsi ekologis kawasan. Aktivitas ini termasuk reklamasi dan alih fungsi lahan yang mengurangi daya dukung lingkungan pesisir. Data menunjukkan terbatasnya luas ekosistem alami seperti mangrove yang	Seribu didominasi kategori sedang dan sebagian mengalami kerusakan, serta padang lamun juga menunjukkan indikasi degradasi. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.3.2 hal.</i>	mencapai kondisi kritis. Data menunjukkan sebagian besar tutupan karang berada pada tingkat sedang dengan indikasi penurunan kualitas di beberapa lokasi. Hal ini mencerminkan kondisi ekosistem yang masih bertahan tetapi rentan terhadap degradasi lebih lanjut. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.3.3; Buku 3: Tabel 25</i> • Padang lamun terbatas/ terdegradasi Padang lamun di wilayah pesisir Jakarta menunjukkan kondisi terbatas dan cenderung terdegradasi akibat tekanan aktivitas manusia dan kualitas perairan. Data menunjukkan penurunan luasan dan kualitas lamun di beberapa lokasi pesisir.	wilayah pesisir. Kondisi ini memperburuk ketahanan sosial-ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir Jakarta. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.3.4 hal 91;</i>

<i>Driving Force</i>	<i>Pressure</i>	<i>State</i>	<i>Impact</i>
tersisa ±298,04, yang mencerminkan tingginya tekanan pemanfaatan ruang. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.3.5 hal 84</i>		Sebanyak 86,67% masuk dalam kondisi rusak. Kondisi ini mengindikasikan menurunnya fungsi ekologis lamun sebagai habitat dan penyangga ekosistem pesisir. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.3.3; Buku 3: Tabel 24</i>	

<i>Response-to-DF</i>	<i>Response-to-Pressure</i>	<i>Response-to-State</i>	<i>Response-to-Impact</i>
• Pengendalian pemanfaatan ruang pesisir (RTRW/RDTR/RZWP3K) • Pengembangan kawasan pesisir berkelanjutan <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.3.5 hal 92</i>	• Pembangunan tanggul laut & NCICD • Pengendalian pencemaran dari darat • Rehabilitasi mangrove <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.3.5 hal 92</i>	• Pemantauan kualitas air laut (IKAL) • Rehabilitasi mangrove, lamun, dan karang • Pengelolaan kawasan konservasi <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.3.5 hal 93</i>	• Sistem polder & pompa • Early warning system rob • Program adaptasi perubahan iklim untuk masyarakat pesisir <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.3.5 hal 93</i>

Tabel *DPSIR* Matra 4. Kualitas Udara

<i>Driving Force</i>	<i>Pressure</i>	<i>State</i>	<i>Impact</i>
• Pertumbuhan ekonomi & konsumsi meningkat Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang didominasi sektor jasa dan perdagangan mendorong peningkatan aktivitas konsumsi energi dan barang, yang secara tidak langsung meningkatkan emisi pencemar udara. Kenaikan PDRB DKI Jakarta mencapai sekitar $\pm 5\%$ per tahun (BPS DKI Jakarta, 2025) berkorelasi dengan peningkatan kebutuhan energi dan transportasi. Hal ini memperbesar tekanan terhadap kualitas udara melalui peningkatan pembakaran bahan bakar fosil.	• Emisi kendaraan bermotor dominan Emisi kendaraan bermotor merupakan sumber pencemar udara terbesar di DKI Jakarta, seiring dengan tingginya jumlah kendaraan yang mencapai lebih dari ± 12 juta unit. Inventarisasi emisi menunjukkan bahwa sektor transportasi menyumbang mayoritas polutan seperti CO, NOx, dan PM2.5, dengan kontribusi mencapai $>60\%$ dari total emisi perkotaan. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi berbahan bakar fosil memperparah beban pencemaran udara, terutama pada jam sibuk.	• ISPU fluktuatif Nilai ISPU di DKI Jakarta menunjukkan kondisi yang fluktuatif sepanjang tahun, dipengaruhi oleh variasi aktivitas harian dan kondisi meteorologis. Data pemantauan kualitas udara menunjukkan bahwa ISPU dapat berada pada kategori sedang (70%) hingga tidak sehat (26%) pada hari-hari tertentu (DLH, 2025). Lonjakan nilai ISPU umumnya terjadi pada periode kemacetan tinggi dan kondisi atmosfer stagnan. <u>Lokus di Buku 2: sub bab II.4.3 hal 100</u>	• Peningkatan kasus ISPA dan pneumonia Pencemaran udara di DKI Jakarta berkontribusi terhadap peningkatan kasus penyakit pernapasan seperti ISPA dan pneumonia. Data menunjukkan adanya tren peningkatan kasus pneumonia 15-25% dalam dua tahun terakhir (2023-2025) yang berkorelasi dengan paparan polutan udara. Partikulat halus seperti PM2.5 diketahui dapat masuk ke saluran pernapasan dan memicu gangguan kesehatan. <u>Lokus di Buku 2: sub bab II.4.4 hal 102</u>

<i>Lokus di buku 2: subbab II.4.1 hal 96-97</i> Mobilitas masyarakat tinggi Tingginya mobilitas masyarakat di DKI Jakarta tercermin dari intensitas perjalanan harian yang didominasi kendaraan pribadi dan angkutan berbasis jalan yang sebagian besar bergantung pada moda berbahan bakar fosil. Kondisi ini menyebabkan peningkatan emisi gas buang secara signifikan, terutama pada jam sibuk. <i>Lokus di Buku 2: sub bab II.4.1 hal 97</i> Jumlah kendaraan terus bertambah Jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan setiap tahun,	<i>Lokus di Buku 2: Sub bab II.4.2 hal 99</i> Emisi industri dan kegiatan usaha Kegiatan industri dan usaha di DKI Jakarta turut berkontribusi terhadap pencemaran udara melalui emisi dari proses produksi dan penggunaan energi. Kawasan industri dan sentra kegiatan ekonomi menjadi titik konsentrasi emisi tidak bergerak yang berdampak pada kualitas udara lokal. <i>Lokus di Buku 2: Sub bab II.4.2 hal 99</i> Konsumsi bahan bakar fosil meningkat Konsumsi bahan bakar fosil yang terus meningkat di sektor transportasi dan industri menjadi sumber utama emisi gas pencemar	IKU kategori “buruk” IKU DKI Jakarta dalam beberapa tahun terakhir berada pada kategori “baik”, dengan menggunakan metode lama berdasarkan PermenLHK 27/2021. Namun semenjak terbitnya Permen LH/BPLH Nomor 14 Tahun 2025 perhitungan nilai IKU sebesar 54,55 masuk pada kategori “buruk” pada tahun 2025 (DLH, 2025). Indikator ini bersifat rata-rata tahunan sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kondisi harian di lapangan. Oleh karena itu, kualitas udara masih menghadapi tantangan pada skala spasial dan temporal. <i>Lokus di Buku 2: Sub bab II.4.3 hal 100-101</i> Konsentrasi polutan masih tinggi	Risiko kesehatan Masyarakat meningkat Paparan jangka pendek dan panjang terhadap polutan udara seperti PM2.5, NO₂, dan O₃ meningkatkan risiko berbagai penyakit, termasuk gangguan pernapasan dan kardiovaskular. Konsentrasi PM2.5 di DKI Jakarta sering melebihi baku mutu yaitu >15 µg/m³, sehingga meningkatkan risiko kesehatan masyarakat. Kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia menjadi yang paling terdampak. <i>Lokus di Buku 2: sub bab II.4.4 hal 102</i> Penurunan kualitas hidup Kualitas udara yang buruk berdampak pada menurunnya kenyamanan hidup masyarakat, terutama di wilayah dengan tingkat
---	--	---	--

dengan total mencapai lebih dari ±12 juta unit tahun 2024. Pertumbuhan ini tidak sebanding dengan kapasitas jalan maupun pengendalian emisi yang efektif. Kendaraan bermotor menjadi kontributor utama pencemar udara, khususnya untuk parameter CO, NO_x, dan PM2.5. <u>Lokus di Buku 2: sub bab II.4.1 hal 97-98</u> Konsumsi BBM/energi meningkat Peningkatan BBM di sektor transportasi dan industri menjadi indikator langsung meningkatnya aktivitas pembakaran yang menghasilkan emisi. Konsumsi energi di DKI Jakarta menunjukkan tren meningkat. Tahun 2023, konsumsi energi sebesar 5,76 BOE per kapita (DLH, 2024). Tingginya ketergantungan pada energi	udara. Data energi daerah menunjukkan adanya tren peningkatan konsumsi BBM setiap tahun (konsumsi tahun 2023 ±225 ribu TJ) seiring dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi dan mobilitas. Pembakaran BBM menghasilkan emisi CO₂, NO_x, dan partikulat yang berkontribusi langsung terhadap penurunan kualitas udara. <u>Lokus di Buku 2: Sub bab II.4.2 hal 99</u> Debu dari konstruksi & aktivitas kota Aktivitas konstruksi dan pembangunan infrastruktur yang masif di DKI Jakarta menghasilkan emisi debu (partikulat) yang signifikan, terutama PM10. Sektor konstruksi diidentifikasi sebagai salah satu	Konsentrasi polutan utama seperti PM2.5, PM10, dan NO₂, di DKI Jakarta melampaui baku mutu, terutama di kawasan padat lalu lintas. Data pemantauan kualitas udara menunjukkan bahwa konsentrasi PM2.5 tahunan berada di atas standar yaitu >15 µg/m³ (DLH, 2025). Tingginya konsentrasi ini berkaitan erat dengan dominasi emisi transportasi dan aktivitas perkotaan. <u>Lokus di Buku 2: sub bab II.4.3 hal 101</u> Kualitas udara belum merata antar wilayah Kualitas udara di DKI Jakarta menunjukkan variasi spasial yang signifikan antar wilayah, dipengaruhi oleh kepadatan lalu lintas, aktivitas ekonomi, dan tata ruang. Berdasarkan data SPKU, wilayah pusat dan	pencemaran tinggi. Paparan polusi udara dapat membatasi aktivitas luar ruang dan menurunkan produktivitas akibat gangguan kesehatan. <u>Lokus di Buku 2: sub bab II.4.4 hal 102</u> Potensi Kerusakan lingkungan (hujan asam) Emisi gas pencemar seperti SO₂ dan NO_x dari kendaraan dan industri dapat bereaksi di atmosfer dan membentuk hujan asam yang merusak lingkungan. Tingginya emisi gas tersebut berpotensi menurunkan kualitas tanah, air, dan vegetasi. Hujan asam juga dapat mempercepat korosi bangunan dan infrastruktur perkotaan. <u>Lokus di Buku 2: sub bab II.4.4 hal 102</u>
---	--	---	--

fosil memperbesar emisi gas pencemar seperti CO₂, NO_x, dan partikulat. <i>Lokus di Buku 2: sub bab II.4.1 hal 98</i>	penyumbang partikulat di kawasan perkotaan padat. Selain itu, aktivitas lalu lintas dan resuspensi debu jalan turut memperburuk konsentrasi partikulat di udara ambien. <i>Lokus di Buku 2: Sub bab II.4.2 hal 99</i>	utara cenderung memiliki konsentrasi polutan lebih tinggi dibanding wilayah pinggiran. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa distribusi pencemaran udara tidak merata di seluruh wilayah kota. <i>Lokus di Buku 2: sub bab II.4.3 hal 101</i>	
<i>Response-to-DF</i>	<i>Response-to-Pressure</i>	<i>Response-to-State</i>	<i>Response-to-Impact</i>
• Pengembangan transportasi publik (MRT, LRT, TransJakarta) • Pembatasan kendaraan pribadi (ganjil-genap) • Penguatan perencanaan kota berbasis lingkungan • Penambahan ruang terbuka hijau (RTH) <i>Lokus di Buku 2: sub bab II.4.5 hal 103</i>	• Uji emisi kendaraan & penegakan hukum (tilang elektronik) • Penerapan kawasan rendah emisi (Low Emission Zone) • Pengawasan emisi industri oleh DLH • Pengendalian debu konstruksi <i>Lokus di Buku 2: sub bab II.4.5 hal 103</i>	• Pemantauan kualitas udara (SPKU/AQMS) • Penyediaan data kualitas udara real-time (udara.jakarta.go.id) • Penambahan titik pemantauan kualitas udara • Evaluasi kebijakan berbasis data <i>Lokus di Buku 2: sub bab II.4.5 hal 103</i>	• Sistem peringatan dini kualitas udara • Edukasi risiko polusi udara • Integrasi isu Kesehatan • Kampanye perubahan perilaku masyarakat <i>Lokus di Buku 2: sub bab II.4.5 hal 104</i>

Tabel *DPSIR* Matra 5. Lahan dan Hutan

<i>Driving Force</i>	<i>Pressure</i>	<i>State</i>	<i>Impact</i>
• Pertumbuhan penduduk & urbanisasi Jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai 10.881.514 jiwa, serta kepadatan rata-rata mencapai 14.973 jiwa/km², yang meningkatkan kebutuhan lahan untuk permukiman dan aktivitas ekonomi secara signifikan. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.5.1 hal 107-108</i> • Eksansi ekonomi (perkebunan, pertambangan, properti) Struktur ekonomi Jakarta didominasi sektor tersier (perdagangan, jasa, properti) dengan kontribusi >70% PDRB, yang mendorong konversi lahan non-terbangun menjadi kawasan komersial.	• Alih fungsi lahan menjadi terbangun Data pemanfaatan lahan menunjukkan dominasi lahan terbangun di DKI Jakarta, sementara proporsi ruang terbuka hijau sangat terbatas dan terus tertekan oleh kebutuhan ruang kota. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.5.2 hal 110</i> • Degradasi tutupan lahan Meskipun IKTL meningkat dari 26,25 (2021) menjadi 36,01 (2025), tekanan pembangunan menyebabkan kualitas ekologis lahan belum optimal. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.5.2 hal 110</i>	• Luas RTH rendah Luas RTH Jakarta hanya sekitar 5,18% dari luas wilayah (~33,33 juta m²), jauh di bawah target nasional 30% (KLHK, 2023). • Tren Tutupan Lahan (IKTL) IKTL meningkat +9,76 poin dalam 5 tahun (2021–2025), menunjukkan adanya perbaikan pengelolaan tutupan lahan meskipun masih dalam kategori rendah. • Tren Kualitas Lahan (IKL) Indeks kualitas lahan relatif stabil hingga 2025, menunjukkan bahwa tekanan pembangunan berhasil dikendalikan namun belum	• Banjir di perkotaan Minimnya RTH dan dominasi permukaan kedap air meningkatkan limpasan, berkontribusi pada banjir tahunan di Jakarta • Penurunan kualitas tanah & air Penurunan infiltrasi air menyebabkan degradasi kualitas air tanah dan meningkatnya limpasan permukaan • Hilangnya keanekaragaman hayati Fragmentasi dan terbatasnya ruang hijau menyebabkan berkurangnya habitat flora dan fauna urban. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.5.4 hal 111-112</i>

<i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.5.1 hal 109-110</i> • Kebijakan pembangunan wilayah & investasi Pembangunan kawasan strategis dan proyek investasi meningkatkan tekanan terhadap ruang terbuka, terutama di wilayah pesisir dan pinggiran kota. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.5.1 hal 109</i> • Kebutuhan infrastruktur (jalan, kawasan industri) Pembangunan infrastruktur transportasi dan fasilitas publik meningkatkan luas lahan terbangun dan mengurangi ruang resapan air.	• Fragmentasi RTH RTH di Jakarta tersebar dalam unit kecil dan terfragmentasi sehingga menurunkan fungsi ekologisnya sebagai penyerap air dan habitat. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.5.2 hal 110</i>	meningkatkan kualitas secara signifikan. • Kawasan Lindung dan RTRW Data menunjukkan ketidaksesuaian antara kawasan lindung RTRW dan tutupan lahan aktual, dengan sebagian area lindung tidak tertutup vegetasi optimal. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.5.3 hal 111</i>	
---	--	---	--

<u>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.3.1 hal 84</u>			
<i>Response-to-DF</i>	<i>Response-to-Pressure</i>	<i>Response-to-State</i>	<i>Response-to-Impact</i>
• Penguatan tata ruang berbasis daya dukung dan pengendalian urban sprawl • Pengendalian pemanfaatan ruang melalui RTRW dan RDTR • Penguatan kebijakan satu peta (One Map Policy) • Perencanaan infrastruktur berbasis lingkungan (green infrastructure) <u>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.5.5 hal 112</u>	• Pembatasan konversi lahan hijau dan pengendalian izin Pembangunan • Rehabilitasi lahan dan peningkatan vegetasi urban • Pengembangan jaringan RTH terintegrasi (green network) • Pengetatan perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) <u>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.5.5 hal 112</u>	• Peningkatan luas RTH melalui hutan kota, taman, dan revitalisasi ruang terbuka • Program rehabilitasi lahan dan penghijauan kota • Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang dan konservasi lahan • Penegakan hukum tata ruang dan perlindungan kawasan lindung <u>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.5.5 hal 112</u>	• Pengelolaan DAS terpadu dan peningkatan kapasitas resapan air • Penerapan konsep kota spons (sponge city) dan sumur resapan • Perlindungan dan pengembangan keanekaragaman hayati urban <u>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.5.5 hal 112</u>

Tabel *DPSIR* Matra 6. Pengelolaan Sampah dan Limbah

<i>Driving Force</i>	<i>Pressure</i>	<i>State</i>	<i>Impact</i>
Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Pertumbuhan Saat ini, jumlah penduduk DKI Jakarta tercatat sebesar 10.881.514 jiwa, serta kepadatan rata-rata mencapai 14.973 jiwa/km². Peningkatan jumlah populasi, pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan peningkatan gaya hidup masyarakat akan berpengaruh terhadap peningkatan timbulan sampah yang dihasilkan. (Khajuria et al., 2010) <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.6.1 hal 114</i> Pola Konsumsi Masyarakat Undang - undang RI Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan	Total Timbulan Sampah Total timbulan sampah yang dihasilkan oleh DKI Jakarta tahun 2025 per hari mencapai 9.187,24 ton (3.353.342,62 ton/tahun). Timbulan sampah tahun 2025 mengalami peningkatan dibanding timbulan sampah tahun 2024 <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.6.2 hal 116-117</i> Komposisi Sampah SIPSN menunjukkan bahwa komposisi sampah berdasarkan jenis sampah tahun 2025 didominasi oleh sampah sisa makanan sebesar 49,87%, sampah plastik sebesar 22,95%, dan sampah karton/kertas sebesar 17,24%. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.6.2 hal 117-118</i>	Penumpukan sampah di TPA TPA Bantargebang saat ini sudah mulai kelebihan kapasitas, dengan jumlah sampah tertampung mencapai 55.000.000 ton tahun 2025. Hal ini sudah masuk kategori membahayakan, ditambah dengan adanya kejadian longsor pada 8 Maret 2026 yang menyebabkan 8 orang meninggal dunia. Selain itu, menurut data SIPSN, jumlah sampah yang belum terkelola masih 75%, sedangkan sampah terkelola baru 25% <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.6.3 hal 119</i> Penurunan Kualitas Udara Berdasarkan data dari KLHK tahun 2024, salah satu factor	Pencemaran air tanah Tingginya pencemaran air tanah (mencapai 30-32% tercemar bakteri coliform) menunjukkan dampak lingkungan dari pengelolaan sampah dan limbah domestik yang belum memadai, yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan masyarakat berbasis air <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.6.4 hal 120</i> Pencemaran Udara Berdasarkan data dari KLHK tahun 2024, salah satu factor penyebab pencemaran udara di DKI Jakarta adalah adanya sampah yang tidak terkelola, dengan persentase 9 – 11%. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.6.4 hal 119</i>

bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam Lokus di Buku 2: Sub-bab II.6.1 hal 114-115 • Pemahaman terhadap Sampah (Khajuria et al., dalam Simangunsong et al., 2023) menyebutkan bahwa tingkat pertumbuhan urbanisasi dan industrialisasi yang pesat telah menyebabkan peningkatan timbunan sampah di negara berkembang. Sementara di sisi lain di negara berkembang, kesadaran masyarakat dalam memilah sampah masih belum terbentuk. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Dinas	• Kapasitas TPS saat ini TPST Bantargebang memiliki luas Area 132,5 Ha, dan saat ini menampung lebih dari 55.000.000ton dengan volume per hari 6.500 – 7.000 ton/hari. Lokus di Buku 2: Sub-bab II.6.2 hal 118	penyebab pencemaran udara di DKI Jakarta adalah adanya sampah yang tidak terkelola, dengan persentase 9 – 11%. Lokus di Buku 2: Sub-bab II.6.3 hal 119	• Peningkatan jumlah penyakit, terutama DBD Kasus DBD di DKI Jakarta sejumlah 10.075 kasus, mencerminkan dampak kesehatan dari lingkungan perkotaan dengan pengelolaan sampah dan drainase yang belum optimal, di mana sampah menjadi media genangan air dan tempat berkembang biak nyamuk Lokus di Buku 2: Sub-bab II.6.4 hal 120
---	--	--	--

Lingkungan Hidup DKI Jakarta Tahun 2021, 2022, dan 2024, masyarakat masih belum tepat mengelompokkan jenis sampah, dan perilaku dalam mengelola sampahnya masih belum sesuai dengan regulasi <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.6.1 hal 115</i>			
<i>Response-to-DF</i>	<i>Response-to-Pressure</i>	<i>Response-to-State</i>	<i>Response-to-Impact</i>
• Terbitnya kebijakan Plastik berbayar di toko swalayan • Terbitnya Pergub No. 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan (KBRL) <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.6.5 hal 120</i> • Edukasi melalui program KuPiLah (Kurangi, Pilah, Olah) <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.6.5 hal 121</i>	• Program Pengelolaan Sampah dari Sumber • Edukasi Spesifik mengenai Pemilahan Jenis Sampah <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.6.5 hal 121</i> • Pemanfaatan Teknologi Pengelolaan Sampah (Maggot, Komposting) <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.6.5 hal 121</i>	• Pemanfaatan Teknologi Pengelolaan Sampah (Maggot, Komposting), inovasi teknologi menggunakan RDF • Regulasi mengenai Larangan Pembakaran Sampah, serta Regulasi Alat Pengendali Emisi <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.6.5 hal 121</i>	• Quality Control pengelolaan air tanah • Quality Control penggunaan Alat Pengendali Emisi • Layanan Kesehatan Terpadu <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.6.5 hal 122</i>

Tabel *DPSIR* Matra 7. Perubahan Iklim

<i>Driving Force</i>	<i>Pressure</i>	<i>State</i>	<i>Impact</i>
Urbanisasi dan pertumbuhan aktivitas ekonomi perkotaan Urbanisasi di DKI Jakarta mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan kebutuhan energi secara signifikan. Jumlah kegiatan usaha mencapai lebih dari ±81 ribu unit (2024) serta kepadatan penduduk yang tinggi, yang berimplikasi pada peningkatan konsumsi energi dan mobilitas. Perkembangan kawasan terbangun juga berkontribusi terhadap peningkatan suhu permukaan kota hingga ±0,17–0,24°C. <i>Lokasi di Bab 2: Sub bab II.7.1 hal 124</i>	Peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor transportasi dan energi Emisi gas rumah kaca di Jakarta didominasi oleh sektor transportasi dan konsumsi energi yang terus meningkat. Sektor transportasi menghasilkan emisi sebesar 15.992 ribu ton CO₂e (54%) (DLH, 2024) yang mencerminkan tingginya pembakaran bahan bakar fosil. Selain itu, konsumsi listrik yang tinggi pada sektor bangunan turut menghasilkan emisi tidak langsung dari sistem pembangkit berbasis fosil.	Tren kenaikan suhu udara perkotaan Suhu udara Jakarta menunjukkan tren peningkatan. Data pengamatan menunjukkan kenaikan suhu rata-rata tahunan serta peningkatan suhu permukaan pada wilayah terbangun dibandingkan area dengan vegetasi. Perubahan tutupan lahan berkontribusi terhadap peningkatan suhu hingga ±0,17–0,24°C. Hal ini menandakan adanya penguatan fenomena urban heat island sebagai bagian dari perubahan kondisi iklim di Jakarta.	Meningkatnya frekuensi banjir dan rob Dampak perubahan iklim di Jakarta terlihat dari meningkatnya frekuensi banjir dan banjir rob, terutama akibat hujan ekstrem dan kenaikan muka air laut. Kejadian banjir masih terjadi setiap tahun walaupun terdapat penurunan jumlah dari 131 kejadian tahun 2024 menjadi 126 kejadian tahun 2025. <i>Lokasi di Bab 2: Sub bab II.7.4 hal 131-132</i> Kerugian ekonomi dan gangguan infrastruktur

• Tingginya jumlah kendaraan bermotor berbahan bakar fosil Jumlah kendaraan bermotor di Jakarta mencapai lebih dari ±12 juta unit (2024) dan didominasi oleh kendaraan berbahan bakar bensin. Tingginya ketergantungan pada kendaraan pribadi meningkatkan konsumsi bahan bakar minyak serta emisi GRK dari sektor transportasi. Data inventarisasi menunjukkan sektor ini menghasilkan emisi signifikan, termasuk NOx dan CO dalam jumlah besar. Kondisi ini menjadikan transportasi sebagai salah satu kontributor utama perubahan iklim di Jakarta. <i>Lokasi di Buku 2: Sub bab II.7.1 hal 124-125</i>	<i>Lokasi di Bab 2: Sub bab II.7.2 hal 128</i> • Berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH) Perkembangan kawasan terbangun di Jakarta menyebabkan berkurangnya RTH yang berfungsi sebagai penyerap karbon. Data menunjukkan proporsi RTH Jakarta masih di bawah target 30% dari luas wilayah, sehingga kapasitas serapan CO₂ menjadi terbatas. Berkurangnya vegetasi juga meningkatkan suhu permukaan kota dan memperkuat fenomena urban heat island. <i>Lokasi di Buku 2: Sub bab II.7.2 hal 129</i> • Emisi metana dari pengelolaan sampah	<i>Lokasi di Bab 2: Sub bab II.7.3 hal 129</i> • Peningkatan kejadian hujan ekstrem dan banjir Perubahan pola curah hujan di Jakarta ditandai dengan meningkatnya intensitas hujan ekstrem dalam waktu singkat. Data kejadian banjir menunjukkan bahwa genangan masih terjadi setiap tahun dengan luasan yang signifikan di berbagai wilayah. Tahun 2025 tercatat 126 kejadian banjir dan 236 jalan tergenang. Peningkatan intensitas hujan ini berdampak pada kapasitas drainase yang tidak mampu menampung limpasan air. Kondisi tersebut menjadi indikator perubahan sistem hidrologi akibat perubahan iklim.	Banjir dan kejadian iklim ekstrem menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan serta gangguan pada infrastruktur perkotaan. Dampak yang ditimbulkan meliputi kerusakan jalan, fasilitas umum, serta terganggunya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Hal ini menyebabkan peningkatan biaya penanganan dan pemulihan setiap tahunnya. BPBD menaksir total kerugian akibat bencana banjir tahun 2025 adalah 19,9 milyar rupiah. <i>Lokasi di Buku 2: Sub bab II.7.4 hal 133-134</i> • Risiko kesehatan akibat perubahan iklim Perubahan iklim berdampak pada kesehatan masyarakat melalui peningkatan suhu,
--	---	---	--

• Tingginya konsumsi energi pada sektor bangunan dan kegiatan usaha Konsumsi energi di sektor bangunan dan kegiatan usaha di Jakarta tergolong tinggi, terutama untuk listrik dan bahan bakar operasional. Penggunaan energi terbesar berasal dari sektor manufaktur, pembangkit listrik, serta bangunan komersial seperti perkantoran dan hotel. Kebutuhan energi yang tinggi ini sebagian besar masih dipenuhi dari sumber energi fosil, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan emisi GRK. <i>Lokasi di Buku 2: Sub bab II.7.1 hal 125</i>	Timbulan sampah di Jakarta yang mencapai ±9187 ton/hari menghasilkan emisi metana dari proses dekomposisi di TPA. Metana memiliki potensi pemanasan global yang jauh lebih tinggi dibandingkan CO₂, sehingga berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim. Pengelolaan sampah yang masih didominasi sistem landfill memperbesar potensi emisi tersebut. <i>Lokasi di Buku 2: Sub bab II.7.2 hal 128-129</i>	<i>Lokasi di Bab 2: Sub bab II.7.3 hal 130</i> • Kenaikan muka air laut di pesisir utara Wilayah pesisir utara Jakarta mengalami kenaikan muka air laut yang berkontribusi terhadap peningkatan kejadian rob. Data menunjukkan adanya tren kenaikan muka air laut yang diperparah oleh penurunan muka tanah di beberapa wilayah pesisir. Kombinasi kedua faktor ini menyebabkan genangan rob terjadi lebih sering dan dengan durasi lebih lama. <i>Lokasi di Buku 2: Sub bab II.7.3 hal 131</i>	kualitas udara yang buruk, dan kejadian banjir. Data menunjukkan kasus penyakit seperti ISPA masih tinggi di Jakarta yaitu ±997.320 kasus dan berpotensi meningkat akibat kondisi lingkungan yang memburuk. Selain itu, banjir juga meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan lainnya. <i>Lokasi di Buku 2: Sub bab II.7.4 hal 134-135</i>
Response-to-DF	Response-to-Pressure	Response-to-State	Response-to-Impact

• Pengembangan transportasi massal: MRT, LRT, dan TransJakarta. • Implementasi kebijakan kendaraan Listrik. • Penerapan Bangunan Gedung Hijau. <u>Lokasi di Buku 2: Sub bab II.7.5 hal 136-138</u>	• Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK DKI Jakarta • Pengembangan dan penataan Ruang Terbuka Hijau (target $\pm 30\%$) • Kebijakan pengelolaan sampah: pembatasan plastik sekali pakai <u>Lokasi di Buku 2: Sub bab II.7.5 hal 139-140</u>	• Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir dan drainase • Pembangunan tanggul pesisir dan program pengamanan pantai utara • Program adaptasi perubahan iklim <u>Lokasi di Buku 2: Sub bab II.7.5 hal 140-141</u>	• Penguatan sistem peringatan dini banjir dan cuaca ekstrem • Integrasi perubahan iklim dalam RTRW dan RPJMD DKI Jakarta • Program peningkatan ketahanan masyarakat dan perlindungan kelompok rentan <u>Lokasi di Buku 2: Sub bab II.7.5 hal 142-143</u>
---	---	--	---

Tabel *DPSIR* Matra 8. Risiko Bencana

<i>Driving Force</i>	<i>Pressure</i>	<i>State</i>	<i>Impact</i>
Pertumbuhan dan kepadatan penduduk Pada tahun 2025, jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai sekitar 10,8 juta jiwa dengan kepadatan rata-rata ± 14.973 jiwa/km², yang mendorong kebutuhan lahan terbangun dan pemanfaatan ruang yang semakin intensif. Kondisi ini berimplikasi pada berkurangnya kapasitas resapan air dan meningkatnya eksposur masyarakat terhadap bahaya seperti banjir dan kebakaran. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.8.1 hal 145-146</i> Urbanisasi dan alih fungsi lahan	Berkurangnya resapan air dan RTH Luasan RTH yang belum optimal menurunkan kapasitas lingkungan dalam menyerap air hujan. Secara keseluruhan, ketersediaan RTH di Provinsi DKI Jakarta baru mencapai sekitar 9–10% dari total wilayah, masih jauh di bawah target minimal 30%. Adapun proporsi RTH publik tercatat hanya sekitar $\pm 5\%$, sehingga menunjukkan keterbatasan ruang hijau yang dapat berfungsi optimal dalam mendukung sistem hidrologi perkotaan. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar air hujan berubah menjadi limpasan permukaan (<i>runoff</i>) yang meningkatkan beban sistem	Kebakaran Tahun 2025 tercatat 810 kejadian kebakaran ($\pm 48\%$ dari total bencana) di DKI Jakarta, menjadikannya kejadian bencana paling dominan. Kejadian dipicu oleh korsleting listrik serta diperparah oleh kondisi permukiman padat dan akses terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan dan infrastruktur permukiman masih rentan terhadap kejadian kebakaran. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.8.3 hal 153-154</i> Banjir Lingkungan perkotaan tidak mampu menampung limpasan air secara optimal. Tahun 2025 tercatat 126 kejadian banjir di	Kerugian ekonomi Kejadian bencana secara langsung mengganggu aktivitas ekonomi dan menyebabkan kerusakan aset di wilayah perkotaan. Tahun 2025 dampak akibat bencana menimbulkan kerugian total $\pm$ Rp 367,6 miliar. Gangguan ini juga berdampak pada terhambatnya aktivitas perdagangan, jasa, dan mobilitas masyarakat. Akibatnya, beban ekonomi tidak hanya ditanggung oleh masyarakat, tetapi juga pemerintah melalui peningkatan biaya penanganan dan pemulihan pascabencana. <i>Lokus di Buku 2 : Sub-bab II.8.4 hal 158-159</i>

Meningkatnya ruang terbangun mendorong dominasi kawasan permukiman dan infrastruktur di wilayah perkotaan. Data menunjukkan bahwa sekitar 89% tutupan lahan DKI Jakarta telah berupa kawasan terbangun yang mencerminkan tingginya tekanan terhadap keseimbangan tata guna lahan. Kondisi ini diperkuat dengan nilai IKTL sebesar 37,22 yang masih berada pada kategori sedang, menandakan keterbatasan kualitas tutupan vegetasi di tengah intensitas pembangunan <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.8.1 hal 146-147</i> • Perubahan Iklim meningkatkan variabilitas dan intensitas kejadian cuaca ekstrem di wilayah perkotaan.	drainase. Akibatnya, potensi genangan dan banjir di wilayah perkotaan menjadi semakin tinggi. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.8.2 hal 151-152</i> • Penurunan muka tanah mengganggu keseimbangan sistem hidrologi dan meningkatkan kerentanan wilayah terhadap genangan dan banjir. Di DKI Jakarta, laju penurunan muka tanah mencapai 10 cm per tahun. Kondisi ini menyebabkan penurunan elevasi daratan relatif terhadap permukaan air laut dan menurunkan kinerja sistem drainase. Akibatnya, risiko banjir dan rob, khususnya di wilayah pesisir, semakin meningkat. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.8.2 hal 151-152</i>	DKI Jakarta yang tersebar di hampir seluruh wilayah, dengan frekuensi tinggi di Jakarta Utara dan Selatan. Kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik wilayah dataran rendah dan keberadaan 17 sungai yang melintasi Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hidrologi perkotaan masih rentan terhadap tekanan curah hujan dan pasang air laut. <i>Lokus di Buku 2 : Sub-bab II.8.3 hal 155-156</i> • Cuaca Ekstrem dan Bencana Lokal Perkotaan Kondisi lingkungan yang semakin rentan akibat variabilitas iklim dan tekanan perkotaan. Pada tahun 2024 tercatat 357 kejadian pohon tumbang dan 12 kejadian angin kencang di DKI Jakarta yang dipicu oleh hujan lebat	• Korban & pengungsian Kejadian bencana menyebabkan sedikitnya 23.258 mengungsi, 90 meninggal dunia, 519 luka-luka, serta 15 orang hilang. Kondisi ini umumnya terjadi pada kawasan dengan kepadatan tinggi dan kapasitas drainase terbatas. Akibatnya, bencana tidak hanya menimbulkan gangguan fisik, tetapi juga meningkatkan kerentanan sosial, terutama bagi kelompok rentan. <i>Lokus di Buku 2 : Sub-bab II.8.4 hal 159-160</i> • Gangguan layanan dasar Bencana menghambat fungsi infrastruktur dan pelayanan publik. Tahun 2025, tercatat 126 kejadian banjir dan 236 jalan tergenang menyebabkan terputusnya akses jalan serta
---	---	---	---

Data curah hujan bulanan menunjukkan adanya konsentrasi hujan tinggi pada periode tertentu dengan nilai yang dapat mencapai $\pm 538,6$ mm/bulan, yang mencerminkan potensi kejadian hujan ekstrem. Pada wilayah dengan dominasi permukaan terbangun, kondisi ini meningkatkan limpasan permukaan dan tekanan terhadap sistem drainase. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.8.1 hal 148-149</i> • Ketimpangan sosial-ekonomi mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengakses hunian layak dan infrastruktur dasar. Pada tahun 2025, nilai gini ratio DKI Jakarta mencapai 0,441 dengan jumlah penduduk miskin sekitar 464,87 ribu jiwa	• Permukiman di kawasan rawan Data menunjukkan terdapat sekitar 445 RW kumuh ($\pm 16,20\%$) di DKI Jakarta yang umumnya berada di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dasar seperti bantaran sungai dan kawasan padat. Kondisi permukiman dengan kepadatan tinggi dan sistem drainase yang terbatas memperburuk potensi genangan, pencemaran, dan risiko kebakaran. <i>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.8.2 hal 152</i>	disertai angin. Selain itu, terdapat 25 kejadian tanah longsor meskipun wilayah Jakarta relatif datar. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan iklim dan kondisi lingkungan perkotaan telah memunculkan berbagai bentuk bencana lokal yang semakin beragam. <i>Lokus di Buku 2 : Sub-bab II.8.3 hal 157</i> • IRB kategori sedang Pada tahun 2025, nilai IRB Provinsi DKI Jakarta berada pada kategori sedang, yang menunjukkan bahwa potensi bencana masih cukup tinggi dan memerlukan penguatan pengelolaan risiko. Kondisi ini sejalan dengan tingginya frekuensi kejadian bencana yang mencapai 1.681 kejadian dalam satu tahun.	mengganggu mobilitas dan distribusi barang dan jasa di berbagai wilayah. Kondisi ini dan bencana lainnya juga berpotensi mengganggu layanan utilitas seperti listrik, air bersih, dan fasilitas umum. Akibatnya, bencana mengganggu sistem perkotaan secara lebih luas. <i>Lokus di Buku 2 : Sub-bab II.8.4 hal 160</i> • Peningkatan risiko penyakit Kondisi pascabencana, memperbesar potensi penyebaran penyakit. Data menunjukkan tingginya kasus ISPA mencapai ± 997.320 penderita, yang rentan meningkat pada kondisi lingkungan lembab dan kualitas udara yang menurun. Selain itu, penyakit kronis lainnya juga dapat
--	---	--	--

(4,28%), yang menunjukkan masih adanya kesenjangan kesejahteraan. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah cenderung tinggal di kawasan padat dan berisiko tinggi seperti bantaran sungai atau wilayah dengan layanan dasar terbatas. Kondisi ini meningkatkan eksposur dan kerentanan terhadap bencana serta memperbesar potensi dampak yang ditimbulkan. <u>Lokus di Buku 2: Sub-bab II.8.1 hal 149-150</u>		<u>Lokus di Buku 2 : Sub-bab II.8.3 hal 157</u>	memperbesar kerentanan kelompok terdampak terhadap kondisi darurat. <u>Lokus di Buku 2 : Sub-bab II.8.4 hal 161</u>
<i>Response-to-DF</i>	<i>Response-to-Pressure</i>	<i>Response-to-State</i>	<i>Response-to-Impact</i>
• Pengendalian pemanfaatan ruang • Pengembangan TOD dan urban sprawl • Program peningkatan RTH dan rehabilitasi lahan <u>Lokus di Buku 2 : Sub-bab II.8.5 hal 162</u>	• Pengendalian banjir • Pembatasan air tanah & perluasan layanan air perpipaan <u>Lokus di Buku 2 : Sub-bab II.8.5 hal 162</u>	• Penguatan sistem peringatan dini dan layanan darurat • Operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk pengendalian curah hujan ekstrem • Penguatan infrastruktur pengendalian banjir	• Penanganan darurat dan bantuan sosial bagi korban bencana • Pemulihan pascabencana • Penguatan layanan kesehatan dan pengendalian penyakit pascabencana

		<u>Lokus di Buku 2 : Sub-bab II.8.5 hal 162-163</u>	<u>Lokus di Buku 2 : Sub-bab II.8.5 hal 164</u>
--	--	---	---

PENETAPAN ISU PRIORITAS

Penetapan isu prioritas lingkungan hidup dalam penyusunan SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, terstruktur, dan partisipatif. Tahapan awal diawali dengan pelaksanaan analisis DPSIR terhadap delapan matra lingkungan hidup. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang berkembang di wilayah DKI Jakarta. Selanjutnya disusun daftar panjang (*longlist*) isu lingkungan hidup yang mencerminkan berbagai tekanan dan tantangan pengelolaan lingkungan dari seluruh matra. Daftar panjang tersebut kemudian dilakukan proses pelingkupan (*scoping*) dengan mengelompokkan isu-isu yang memiliki kesamaan karakteristik dan keterkaitan, sehingga diperoleh daftar pendek (*shortlist*) isu lingkungan hidup yang lebih terfokus dan representatif terhadap permasalahan utama yang dihadapi.

Tahap berikutnya adalah penentuan isu prioritas melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dan pengisian kuesioner. Kegiatan FGD dilaksanakan pada tanggal 08 April 2026, dengan jumlah peserta sebanyak 61 orang yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Instansi/BUMD, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan lainnya. Dalam forum tersebut, dilakukan pembahasan terhadap daftar pendek isu lingkungan hidup, serta penilaian terhadap masing-masing isu berdasarkan beberapa kriteria utama.

Kriteria yang digunakan dalam penentuan isu prioritas meliputi: (1) urgensi, yaitu tingkat kebutuhan penanganan secara segera; (2) keseriusan, yaitu besarnya dampak yang ditimbulkan apabila isu tidak ditangani; (3) pertumbuhan (*growth*), yaitu potensi isu untuk semakin memburuk; (4) rasionalitas, yaitu tingkat kompleksitas permasalahan serta kapasitas penanganannya dari sisi kebijakan, teknologi, dan sumber daya; serta (5) tingkat perhatian publik dan luasnya dampak terhadap masyarakat. Kelima kriteria tersebut digunakan sebagai dasar penilaian secara komprehensif.

Selain melalui diskusi, penilaian juga dilakukan secara kuantitatif melalui pengisian kuesioner oleh para peserta, guna memperoleh pembobotan dan peringkat isu secara lebih objektif. Hasil pengolahan data kuesioner kemudian dikombinasikan dengan hasil diskusi FGD untuk menghasilkan kesepakatan bersama terkait isu prioritas yang akan ditetapkan. Berdasarkan hasil FGD dan analisis kuantitatif tersebut, disepakati bahwa jumlah isu prioritas lingkungan hidup yang akan dibahas lebih lanjut adalah sebanyak 5 (lima) isu. Selanjutnya, isu prioritas tersebut dirangkum dalam tabel berikut yang memuat uraian isu, alasan penetapan, respons yang telah dilakukan, serta capaian atau realisasi yang telah dicapai sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup ke depan.

TABEL ISU PRIORITAS

Isu Prioritas	Alasan Penetapan	Response			Pencapaian/Realisasi pada Tahun Kajian/ Pelaporan
		Program Penanganan	Program Inovasi	Kebijakan Penanganan	
Isu prioritas 1: Pencemaran Udara akibat Emisi Kendaraan Bermotor	Alasan: Pencemaran udara di DKI Jakarta masih didominasi oleh emisi kendaraan bermotor yang menyumbang lebih dari $\pm 70\%$ sumber pencemar udara perkotaan. Meskipun nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sub-indeks udara menunjukkan tren relatif stabil/cenderung membaik dalam 5 tahun terakhir, konsentrasi polutan seperti PM2.5 masih sering melebihi baku mutu dan berdampak pada kesehatan masyarakat. Kondisi ini diperkuat oleh tingginya jumlah	• Uji emisi kendaraan bermotor • Pengembangan transportasi publik (TransJakarta, MRT, LRT) • Pembatasan kendaraan melalui kebijakan ganjil-genap • Pemantauan Kualitas Udara Ambien • Pelatihan Teknisi Uji Emisi	• Elektrifikasi transportasi (kendaraan listrik) • Integrasi moda transportasi berbasis transit (TOD) • Penerapan sistem informasi uji emisi kendaraan (Si Elang Biru Jaya) • Integrasi data uji emisi kendaraan dengan program disinsentif parkir • Publikasi hasil pemantauan	• Pergub DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor • Kepgub No. 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara	• Peningkatan jumlah kendaraan yang mengikuti uji emisi • Pengembangan jaringan transportasi publik (penambahan koridor TransJakarta, perluasan MRT/LRT) • Nilai IKLH sub-indeks udara berada pada kategori sedang–baik (IKU = 72,45)

Isu Prioritas	Alasan Penetapan	Response			Pencapaian/Realisasi pada Tahun Kajian/ Pelaporan
		Program Penanganan	Program Inovasi	Kebijakan Penanganan	
	kendaraan bermotor yang mencapai ± 12 juta unit serta pertumbuhan mobilitas perkotaan.		kualitas udara real time melalui website udara Jakarta dan aplikasi JAKI		
Isu prioritas 2: Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah dari Hulu ke Hilir	Alasan: Timbulan sampah di DKI Jakarta terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan konsumsi, mencapai sekitar ± 279.254 ton/hari. Pada tahun 2025 terjadi kenaikan 6% dari tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat 75% sampah yang belum terkelola dan sekitar 9-11% pencemaran udara akibat sampah. Pengelolaan sampah masih didominasi pendekatan hilir dengan ketergantungan tinggi	• Pengurangan sampah dari sumber (3R) • Pengelolaan TPST Bantargebang • Pengembangan bank sampah • KuPiLah • Komposting/ Maggot	• Pengelolaan sampah menjadi RDF (Refuse Derived Fuel) • Digitalisasi pengelolaan sampah • Pengelolaan sampah elektronik (e-waste) rumah tangga • Layanan penjemputan sampah berukuran	• Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah • Perda DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah • Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013	• Penurunan timbulan sampah yang masuk ke TPA sebesar $\pm 4\%$ • Peningkatan jumlah bank sampah induk aktif 5 unit, bank sampah unit 2.518 unit • Capaian pengurangan sampah $\pm 28\%$, bila mengacu target Jakstrada

Isu Prioritas	Alasan Penetapan	Response			Pencapaian/Realisasi pada Tahun Kajian/ Pelaporan
		Program Penanganan	Program Inovasi	Kebijakan Penanganan	
	pada TPST Bantargebang. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumber masih terbatas.		besar (bulky waste) • Penanganan sampah di badan air dengan saringan sampah	tentang Pengelolaan Sampah • Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga • Pergub No. 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan (KBRL) • Pergub 108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Prov. DKI	

Isu Prioritas	Alasan Penetapan	<i>Response</i>			Pencapaian/Realisasi pada Tahun Kajian/ Pelaporan
		Program Penanganan	Program Inovasi	Kebijakan Penanganan	
				Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga • Pergub No. 127 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah • Pergub No. 33 Tahun 2021 tentang Bank Sampah • Pergub No. 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan	

Isu Prioritas	Alasan Penetapan	Response			Pencapaian/Realisasi pada Tahun Kajian/ Pelaporan
		Program Penanganan	Program Inovasi	Kebijakan Penanganan	
Isu prioritas 3: Pencemaran Air akibat Limbah Domestik dan Industri	Alasan: Kualitas air sungai di DKI Jakarta umumnya berada pada kondisi tercemar ringan hingga berat, yang disebabkan oleh limbah domestik dan industri. Cakupan layanan air limbah perpipaan masih terbatas, sehingga sebagian besar limbah dibuang langsung ke badan air.	• Pengawasan dan pengendalian limbah cair pada kegiatan/usaha • Program kali bersih • Pembangunan dan Pengembangan SPALD Terpusat Skala Pemukiman • Pemantauan Kualitas Air Permukaan dan Air Tanah	• Pembangunan Jakarta Sewerage System (JSS) • Digitalisasi SCADA dan Digital Twin pada Infrastruktur Sumber Daya Air • Pemantauan kualitas air sungai secara online	• Perda DKI Jakarta No. 10 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	• Jumlah layanan SPALD 72 unit • Status mutu air masih didominasi kategori tercemar ringan–sedang • nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 56,87 kategori sedang
Isu prioritas 4: Dampak Kesehatan	Alasan: Pencemaran lingkungan seperti udara dan air berdampak langsung	• Pengendalian pencemaran udara dan air	• Sistem early warning kualitas udara	• Kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan	• Penurunan/peningkatan terkendali kasus ISPA

Isu Prioritas	Alasan Penetapan	Response			Pencapaian/Realisasi pada Tahun Kajian/ Pelaporan
		Program Penanganan	Program Inovasi	Kebijakan Penanganan	
Masyarakat akibat Pencemaran Lingkungan	terhadap kesehatan masyarakat, ditunjukkan oleh meningkatnya kasus penyakit berbasis lingkungan seperti ISPA. Berdasarkan data kesehatan 2026, kasus ISPA termasuk dalam penyakit terbanyak di DKI Jakarta dengan jumlah kasus mencapai ±997.320 kasus.	• Memperluas akses sanitasi layak (JSDP) • Layanan Poli ISPA & Pojok Polusi di Puskesmas • Program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) • Edukasi kesehatan masyarakat • Smart Posyandu	• Integrasi data lingkungan dan kesehatan • Publikasi hasil pemantauan kualitas udara real time melalui website udara Jakarta dan aplikasi JAKI	• Program promotif dan preventif kesehatan	• Peningkatan akses layanan kesehatan lingkungan • Integrasi data lingkungan dan kesehatan
Isu prioritas 5: Penurunan Kualitas dan Kuantitas Sumber Air Baku	Alasan: Ketersediaan air baku di DKI Jakarta menghadapi tekanan akibat penurunan kualitas air permukaan dan keterbatasan sumber air.	• Penyediaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) • Pengendalian penggunaan air tanah	• Pengembangan reuse air (air daur ulang) • Smart water management	• Pergub No. 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah.	• Peningkatan cakupan layanan air perpipaan • Penurunan penggunaan air tanah di beberapa wilayah

Isu Prioritas	Alasan Penetapan	<i>Response</i>			Pencapaian/Realisasi pada Tahun Kajian/ Pelaporan
		Program Penanganan	Program Inovasi	Kebijakan Penanganan	
	Ketergantungan terhadap air baku dari luar wilayah (misalnya Waduk Jatiluhur) masih tinggi, sementara eksploitasi air tanah menyebabkan penurunan muka tanah.	• Perlindungan sumber air		• Rencana pengembangan SPAM regional	• Ketergantungan air baku eksternal masih tinggi